



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1614/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

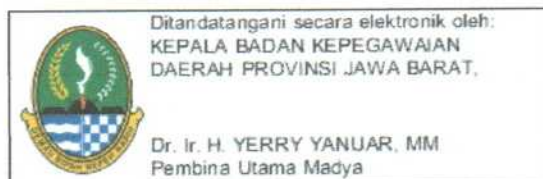
Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nomor: 19251/KPG.01/Kepegumas tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
106	USEP KOSAMAN	197010302007011011	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASIUMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
107	DJUMARNO	197211032008011002	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
108	ANI SETIANINGSIH	197609032009012001	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
109	ANAS TJAHJANA	196904012008011006	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
110	PONIMIN	196711022008011002	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
111	ODANG KUSMANA	197610101996031001	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
112	YAYU ROHMAH MULYANI	196410301986032004	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
113	ELIA YULAEVA, S.K.M., MKM	197402071996032001	Pembina (IV/a)	S2	7	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
114	IRNA AVIANTI, S.K.M., M.Kes.	196910251992032006	Pembina (IV/a)	S2	7	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
115	EPIH SITI SOPIAH, S.E	199103052020122015	Penata Muda (III/a)	S1	7	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
116	YAYA SUDARYA, S.Sos.	196503081988031008	Penata TK.I (III/d)	S1	7	PERANCANG DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PERANCANG DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
117	SUTARSO, S.IKom	197006062007011013	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
118	RAHMAT	197412022008011001	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
119	RIBUT SUNKOWO	196903052008011003	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
120	IDING	196910172007011007	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
121	RUSMANA	197610132009011002	Juru (I/c)	SD	3	PRAMU BAKTI	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PRAMU BAKTI	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN
122	INEZ ROSELIZA, A.Md.M.	199506262020122026	Pengatur (II/c)	D3	6	PRANATA SARANA DAN PRASARANA DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	SEKSI PENYELENGGARAAN, UPTD PELATIHAN KESEHATAN



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
359	ABDUL ROHMAN	198301282010011005	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
360	TETI SUMARNI, S.E.	197111022009012001	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
361	IRWAN RAHMAN, S.M.	198309022010011010	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
362	EGI ADI PERDANA, A.Md	198911142020121006	Pengatur (II/c)	D3	6	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGELOLA DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
363	RINI EKAWATI	198112082010012005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
364	RISKA SEPTIANA, S.Kom	199109272020122019	Penata Muda (III/a)	S1	7	ANALIS SISTEM INFORMASI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

